

INDUSTRI PANGAN INDONESIA PERLU PEDOMAN HADAPI WABAH COVID-19

Oleh **Purwiyatno Hariyadi**

Dunia sedang dilanda wabah COVID-19. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan kondisinya cepat sekali berubah. Situasi ini memengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia dan semua sektor industri, tidak terkecuali sektor industri pangan.



Industri pangan mempunyai tugas penting dalam melawan COVID-19 ini, khususnya untuk menjaga pasokan pangan aman, bergizi dan bermutu untuk penduduk Indonesia, sehingga penduduk mempunyai daya tahan tubuh yang baik untuk melawan COVID-19. Karena itu, pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan harus memastikan kelangsungan ketahanan pangan masyarakat, dengan memastikan sistem pangan nasional tetap berjalan.

Secara umum, kebijakan ini diperlukan untuk menjaga rantai pasok pangan nasional (yang juga banyak berkaitan dengan rantai pasok pangan global) tetap berjalan efektif. Artinya, perlu ada pemastian bahwa logistik pangan nasional di masa krisis wabah COVID-19 ini tetap berjalan, tetap melayani permintaan kebutuhan pangan masyarakat.

Untuk itu, sektor industri pertanian dan pangan memerlukan pedoman dari pemerintah untuk bisa tetap beroperasi, mendukung upaya penanganan wabah COVID-19 ini.

Pemerintah, antara lain perlu memberikan perlakuan khusus (perlindungan, pelatihan dan insentif) untuk pekerja dalam sektor pertanian dan pangan, sehingga terus bisa bekerja secara efektif dan aman selama periode kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat, *physical-distancing*, dan penutupan aktivitas perkantoran dan bisnis.

Pemerintah harus memberikan pedoman/protokol operasional dan pelatihan yang dirancang khusus untuk pekerja pertanian/pangan yang terlibat dalam produksi, penanganan, pengolahan, distribusi, ritel pangan untuk membantu menghindari penyebaran COVID-19. Pekerja pertanian/

pangan ini termasuk *online shopping*, *online food delivery*, dan lain-lain.

Pedoman/protokol operasional yang diperlukan

Dalam menjalankan operasi rutinnnya, industri pangan tetap harus secara disiplin dan penuh tanggung jawab melaksanakan sistem manajemen keamanan pangan, termasuk di dalamnya mengaplikasikan *good hygienic practices* dan sistem *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP). Secara khusus, sesuai dengan kebijakan meminimalkan penyebaran COVID-19 (*"flattening the coronaviries curve"*), industri memerlukan pedoman dalam hal, antara lain, tetapi tidak terbatas pada:

1. Penanganan bahan pengemas pangan
2. Proses pembersihan, penanganan dan pembuangan sisa cairan pembersih
3. Manajemen karyawan sakit
4. Aplikasi kebijakan *"physical-distancing"* pada kondisi lapangan dan pabrik, restaurant, supermarket, dan lain-lain
5. Penanganan kantin dan tempat istirahat karyawan
6. Protokol khusus untuk pembelian-bawa-pulang (*takeaways*) dan restoran yang menawarkan layanan pesan-antar (*delivery service*)
7. Pedoman pasar segar di tingkat petani
8. Dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi khas Indonesia.

Pedoman-pedoman ini bisa saja dibuat oleh masing-masing industri secara terpisah, namun sebaiknya dibuat secara nasional, menjadi bagian integral dari

upaya nasional yang dikendalikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pedoman sejenis sudah dikeluarkan oleh beberapa lembaga di negara lain, seperti di United Kingdom (UK) (<https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-guidance-for-food-businesses/guidance-for-food-businesses-on-coronavirus-covid-19>) dan Amerika Serikat (<https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19>).

Di Amerika Serikat (AS) secara tegas menekankan bahwa sektor pertanian dan pangan adalah salah satu dari 16 sektor infrastruktur penting. AS mendefinisikan sektor infrastruktur penting sebagai sektor di mana aset, sistem, dan jaringannya, baik fisik maupun virtual, dianggap sangat penting bagi AS sehingga ketidakmampuan atau kehancurannya akan berdampak buruk pada keamanan, ekonomi nasional, kesehatan atau keselamatan publik nasional, atau kombinasi daripadanya. Hal ini dinyatakan di dalam "Presidential Policy Directive 21" (<https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors>).

Karena alasan tersebut di atas, maka pedoman-pedoman ini diperlukan untuk memastikan bahwa sektor pertanian dan pangan tetap berfungsi efektif, memberikan pasokan pangan bagi bangsa, khususnya pada masa wabah COVID-19 ini, menjamin keamanan, ekonomi nasional, kesehatan atau keselamatan publik nasional.

Bersama kita bisa atasi wabah COVID-19 ini. Semoga.